



POLICY PAPER

Dr. Yunardi, S.KM. M. Kes Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Bungo

DESKRIPSI OPEN DEFECATION FREE (ODF) DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 (Hasil Riset Kualitatif)

Eksekutif Summary

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Indikator ini sangat penting dalam penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sekaligus menjadi indikator prasyarat dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Masalahnya ODF tahun 2021 Kabupaten Bungo baru sesebesar 33,9%, sementara untuk dapat dinilai setelah mencapai 60%.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan indepth interview dan observasi dokumen. Hasil penelitian *Masih ada prilaku buang air besar sembarangan di* desa dengan capaian akses jamban dibawah 25% yakni Desa Tanjung Bungo Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang (18,25%), Desa Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh (18,66%), Desa Muaro Tebo Pandak Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang (22,22%). Artinya masih ada penduduk desa yang melakukan kebiasaan buang air besar sembarangan sebab masih rendahnya akses jamban di desa. Kesimpulan masih banyak masyarakat yang buang air besar ke sungai yang merupakan kebiasaan turun temurun, sebagain menganggap jamban belum menjadi kebutuhan. Rekomendasi polarisasi *social marketing* pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat, penguatan ODF dengan regulator dan STBM yang mengakar

Latar Belakang

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan dan perilaku, perubahan perilaku sehat ini sangatlah sulit apabila masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk merubahnya. Perubahan ini dimulai dari diri sendiri dan dimulai sejak dini, sehingga menjadi terbiasa untuk melakukan kegiatan yang lebih besar dalam rangka menuju pola hidup sehat.

Masalah

Apakah masyarakat dipinggiran sungai merasa butuh dengan jamban sehat? Faktor apa yang menyebabkan rendahnya cakupan ODF? Dan apa yang harus dilakukan?

Tujuan

Adapun tujuan umum dari kajian ini adalah upaya untuk meningkatkan capaian ODF, dengan tujuan khusus meliputi:

1. Menemukan faktor rendahnya kesadaran untuk tidak buang air besar ke sungai
2. Adanya solusi untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak buang air besar ke sungai

Metodologi

Kajian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data *indepth interview* kepada *stake holders* terkait dan observasi dokumen. Sampel desa diambil secara purposif yakni desa/dusun di pinggir hulu sungai di Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang dan Kecamatan Tanah Tumbuh.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data online pada monev Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (**STBM**) di Indonesia di <http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev/> tahun 2022, tercatat masih ada 3 (tiga) desa dengan capaian akses jamban dibawah 25%. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Kecamatan	Desa/Dusun	KK yang memiliki Jamban
	Limbur Lubuk Mengkuang	Tanjung Bungo	18,25 %
		Muara Tebo Pandak	22,22 %
	Tanah Tumbuh	Renah Pulau Jelmu	18,66 %

Berdasarkan tabel diatas diasumsikan ketiga desa tersebut lebih banyak penduduknya yang melakukan buang air besar sembarangan karena keterbatasan fasilitas akses jamban di desa. *Menurut tokoh masyarakat Desa Renah Jelmu Kecamatan tanah Tumbuh terutama pada masyarakat yang tinggal dekat dengan aliran sungai. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang belum memiliki jamban adalah pertama, kendala*

ekonomi guna membangun jamban milik pribadi yang memiliki tengki septik, kedua belum tersedianya air untuk MCK dirumah. Masyarakat yang belum memiliki jamban juga mengatakan bahwa sekitar tahun 2003 ada bantuan air bersih dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM), berupa bangunan bendungan guna mengaliri air bersih ke rumah. Namun bendungan tersebut saat ini telah rusak sehingga air bersih tidak lagi mengalir ke rumah. Diakui juga masyarakat bahwa pernah ada bantuan fisik membangun jamban, namun jumlahnya terbatas.

Habit adalah suatu rutinitas perilaku yang diulang-ulang secara teratur dan cenderung terjadi tanpa disadari. Dari sudut pandang psikolog, habit dipahami sebagai cara berpikir, keinginan, atau perasaan yang kurang lebih tetap yang diperoleh melalui pengulangan pengalaman mental sebelumnya.(Andrews, 1903). Habit adalah serangkaian tindakan yang diulang-ulang oleh seseorang untuk hal yang sama dan berlangsung tanpa proses berpikir (Siagian, 2015). Pola kebiasaan turun temurun kecenderungan BAB di sungai masih sulit dirubah dan rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga, jamban dianggap belum menjadi kebutuhan masyarakat, walaupun sebenarnya mereka mampu untuk membuat jamban di rumah masing-masing. Disamping itu keterbatasan sarana air bersih yang tersedia belum optimal, sehingga mempengaruhi motivasi masyarakat untuk membangun jamban sendiri.

Masih banyaknya perilaku buang besar sembarangan terkait dengan alasan ekonomi memang menjadi variabel penting dan menjadi fokus oleh pemerintah Kabupaten Bungo, namun alasan ini bukalah penyebab satu-satunya, dimana angka kemiskinan di Kabupaten Bungo sebesar 5,7% artinya setiap seratus setiap 100 KK ada 6 KK miskin.

Persoalan utama adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah, yang disebabkan pola kebiasaan turun temurun dan belum memahami tentang dampak buang air sembarangan, sehingga jamban yang dibangun tidak dimanfaatkan secara maksimal termasuk pemeliharaan sumber air bersih yang dibangun PNPM.

Alasan pembuatan *septic tank* di lokasinya padat perumahan yang dikuatirkan akan mencemari sumur dapat dibangun dengan metode *septic tank* biofilter yang tidak

rembes ke tanah dan tidak dialiri air deterjen, sehingga terbentuk mikroba pengurai. Model ini tangki tidak cepat penuh sebagaimana yang dikeluhkan oleh pemakai.

Intervensi yang dilakukan adalah edukasi masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik melalui kegiatan Tim STBM, kampanye oleh kelompok profesional disamping terus melakukan pemicuan pengadaan sarana sanitasi.

Bagi masyarakat yang belum punya jamban membutuhkan jamban pribadi ketimbang jamban umum atau bersama. Alasannya adalah kesulitan menuju lokasi jamban umum dan sulit untuk bekerja sama menjaga kebersihan jamban bersama.

Menumbuhkan rasa pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat akan memacu masyarakat untuk memiliki sarana jamban di rumahnya masing-masing tidak memanfaatkan sarana secara bersama. Adapun alasan warga tidak memanfaatkan jamban umum dengan alasan kesulitan menuju lokasi jamban umum dan sulit untuk bekerja sama menjaga kebersihan.

Melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa jamban sehat lebih penting *handphone* dan televisi. Tohh... ke BAB ke sungai juga berjarak dan sulit serta bergantian. Pendekatan lain yang dapat kita edukasi adalah kampanye dengan berbagai tema seperti

“ORANG CEDAS TIDAK BAB KE SUNGAI”

“DIHILIR JUGA SAUDARA KITA JANGAN KIRIMKAN KOTORAN”

**“SEKALI ANDA BAB KE SUNGAI BERARTI TELAH
MENYUMBANG 100JUTA BAKTERI JAHAT”**

“INI SUNGAIKU BUKAN WC MU”

Kepala Desa menyampaikan, dana desa bisa digunakan 100 persen untuk pembuatan jamban, hanya saja dana desa itu umum. Ketika musyawarah desa tentu kebutuhan umum yang diperioritaskan oleh masyarakat, contohnya jalan, rehap gedung. Selain itu, dana desa telah diatur oleh pusat tentang penggunaan dana desa. Misalnya diterapkan untuk BLT karena adanya covid-19. Perencanaan stop BaBS kedepannya telah direncanakan. Namun berbagai kendala yang dihadapi dalam merealisasikannya. (1) Seperti rencana pembuatan MCK umum, terkendala oleh lokasi yakni bagi rumah warga yang terletak diatas bukit, terkendala lahan, karena pemukiman yang ada di dusun itu padat sehingga lahan kosong tidak ada (2) air (pdam belum masuk), (3) pagu dana desa tidak mencukupi, (4) dana yang dari provinsi dialihkan untuk pemberdayaan, ataupun dialihkan untuk keperluan lain. Solusi yang disampaikan kepala desa adalah berupa aliran PDAM masuk ke desa, program CWSA, air bersih yang dirawat kembali yakni air yang bersumber dari air sungai yang belum tercemar.

Sudah ada Perbup No. 15 tahun 2022 tentang Peran Dusun dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam BAB V pasal 13 ayat 2 Lima Layanan diantaranya Sanitasi (jamban) dan air bersih. Artinya RIO dapat menggunakan dana desa untuk pembuatan jamban kepada keluarga miskin.

Dampak pencemaran

Permasalahan yang ditemukan warga di desa sering diare dan gatal-gatal. Kondisi tersebut diakui oleh Kepala Desa. Senada dengan ungkapan fasilitator dan sanitarian bahwa masih banyak masyarakat yang terdampak kasus diare dan penyakit kulit. Masyarakat juga mengalami gatal-gatal karena mandi disungai.

Diare, gatal-gatal dalam penggunaan air sungai pertanda air sungai telah tercemar. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo bekerjasama dengan FORDAS dan lembaga masyarakat peduli lingkungan telah melakukan pengawasan terkait pencemaran air sungai. Namun kesadaran dan perilaku sebagian masyarakat yang masih rendah, dimana sebagian masyarakat membuang kotoran dan limbah ke sungai.

Strategi

Secara keseluruhan sangat diperlukan pendampingan bagi pihak yang berhubungan langsung dengan program ODF. Alasan yang diakui oleh sanitarian bahwa *petugas sanitarian per kecamatan hanya satu orang sementara jarak tempuh antar desa jauh*. Senada dengan ungkapan masyarakat yang belum memiliki jamban hanya mendapatkan penyuluhan satu kali dalam enam bulan terakhir dari sanitarian. Artinya kekurangan pendampingan bagi masyarakat merupakan tantangan terhadap pencapaian 100% akses jamban di desa. Kendala lain bagi sanitarian adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar ketika melakukan pemicuan, ketika yang diundang untuk pemicuan di desa biasanya hanya 30 orang sebab masyarakat sedang bekerja sehingga masih ada masyarakat belum mendapatkan pemicuan dan mengetahui kebijakan tentang ODF.

Strategi yang telah dilakukan oleh sanitarian yaitu pertama pemicuan tiga kali per desa secara bergilir per tahun. Pemicuan di desa dilaksanakan lebih kurang dua jam, dengan mengundang masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang terpilih dan membuat jamban, dan ada juga masyarakat yang masih acuh setelah simulasi dilakukan. Strategi kedua, pada tahun 2019 yaitu pembentukan iuran atau arisan jamban, tapi langkah ini tidak berjalan sebab masyarakat kurang percaya satu sama lain. Strategi ketiga, mengajak perangkat desa untuk menggunakan dana desa pada program 100% akses jamban

- a. Tugas sanitarian sebagian dapat didelegasikan kepada petugas Puskesmas Pembantu dan bidan di desa. Tugas pemberdayaan tidak mesti dikerjakan oleh satu orang tetapi banyak *stake holders* yang semestinya dirangkul terutama tokoh formal di dusun.
- b. Kedepan kita harus memaksimalkan Pokja di Desa, Kader Pemberdayaan Pembangunan (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang akan dipimpin oleh TP-PKK.
- c. Kerja keras dan kesungguhan amat diperlukan untuk edukasi dan motivasi terutama tokoh masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*),
- d. OPD dapat bekerja sama dengan Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS).

Masalah dalam Pelaksanaan Pembinaan

Kendala lain bagi sanitarian adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar ketika melakukan pemicuan

Tugas ini adalah tugas bersama, “ada mesin penggerak dan ada driver” mesin penggeraknya adalah Tim STBM dan driver-nya sanitarian dengan pendekatan *scientific bases*.

Strategi kedua, pada tahun 2019 yaitu pembentukan iuran atau arisan jamban, tapi langkah ini tidak berjalan sebab masyarakat kurang percaya satu sama lain.

Kelembagaan amat penting untuk keberlanjutan (*sustainability*) kegiatan, kepercayaan kepada pengelola, membuat aturan organisasi yang jelas, transparansi dan yang tak kalah penting dalam keberlanjutan kegiatan dimana orang-orang merasa butuh dengan kegiatan tersebut.

Strategi ketiga, mengajak perangkat desa untuk menggunakan dana desa pada program 100% akses jamban

Penggunaan dana desa telah diatur 8% untuk kesehatan, aturan ini diperjelas dengan Perbup nomor 15 tahun 2022 tentang tentang Peran Dusun dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang salah satu kegiatannya adalah pelayanan sanitasi. Mengingat keterbatasan anggaran maka bantuan sarana harus diprioritaskan kepada keluarga berisiko stunting dan miskin.

Komunikasi dan Sinkronisasi

Diakui kader kesehatan masyarakat, pemicuan terakhir kali dilakukan pada 2019 dan akan dilaksanakan kembali pada agustus 2022. Pelaksanaan pemicuan sebaiknya ditingkatkan lagi kepada masyarakat Desa Sungai Renah.

Benar, kegiatan pemicuan hampir tidak berjalan dimasa pandemi Covid-19, namun demikian pemantauan tetap berjalan, dan pada tahun 2022 kegiatan ini pemicuan oleh Perkim, Dinas Kesehatan dan OPD lainnya sedang berjalan. Kedepan arus komunikasi antara Pokja Kecamatan dan Forum Kabupaten Bungo Sehat harus terjalin dengan baik, sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat terakomodasi dengan baik termasuk dusun-dusun yang jauh seperti Renah Sungai Besar dan Renah Sungai Iput. Kami akui penguatan kelembagaan disemua tingkat perlu terus ditingkatkan

Regulasi

Telah tersedia kebijakan tentang ODF yang berasal dari Kemenkes berupa surat edaran, dari tingkat provinsi belum ada, kemudian tingkat kabupaten berupa peraturan dari Bupati tentang percepatan ODF dan kabupaten sehat, di tingkat desa yakni peraturan Datuk Rio tentang ODF. Namun, untuk tingkat desa belum semuanya memiliki peraturan datuk rio tentang ODF dan menjadikan ODF sebagai program prioritas, sebab surat edaran tentang percepatan ODF banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa sehingga hanya sebagian desa yang menggunakan dana desa untuk stop buang air besar sembarangan.

Memang belum semua desa membuat peraturan terkait ODF, namun peraturan Bupati dapat menjadi rujukan dalam penggunaan dana desa untuk masalah Open Defection Free (ODF) ini.

Bupati dan seluruh jajarannya berkomitmen penuh terhadap upaya percepatan ODF sejalan perubahan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang sebelum tahun 2022 target untuk penilaian hanya sebesar 60% bebas ODF, tetapi pada tahun 2022/2023 target desa bebas buang air besar sembarangan menjadi 80%.

Penyediaan fasilitas sudah mendekati target terbaru, namun sangat dimungkinkan pemanfaat sarana yang belum maksimal terkait dengan rendahnya PHBS.

Biaya

Hasil wawancara dengan sanitarian Kecamatan Tanah Tumbuh, yakni sarana prasarana sudah cukup memadai yakni berupa kendaraan dan alat peraga. Diakui sanitarian, tidak ada kendala terkait sarana dan prasarana. Sumber anggaran dana untuk sanitarian berasal dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) bersumber dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional). Dana juga dirasakan cukup oleh sanitarian.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan secara fisik dianggap cukup, artinya perilaku yang butuh waktu dalam perubahannya. Secara teori ilmu yang diperoleh belum langsung akan membuat perubahan perilaku tetapi masih ada komitmen kesadaran atau asertif untuk berbuat. Kesadaran dan asertif inilah yang secara terus menerus akan distimulasi

menjadi perilaku. Perubahan perilaku untuk tetap bertahan perlu pengawasan beruta aturan-aturan tertentu dalam komunitas tersebut.

Pengawasan

Pelaksanaan monitoring program 100% stop buang air besar sembarangan yakni verifikasi menuju desa ODF dan Program Indonesia Sehat Keluarga (PIS-K). Kepala desa sering melakukan monitoring namun hambatannya adalah masyarakat kurang mendukung

PIS-PK merupakan bukan kegiatan baru yang lebih menekankan pada cara pandang dan cara bertindak puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara terintegrasi program dengan target sasaran seluruh anggota keluarga (*total coverage*). Integrasi program menjadi kekuatan dalam pelaksanaan PIS-PK, dimana upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang terintegrasi dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga). Ada 12 indikator utama dalam PIS-PK yang salah satunya adalah Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Kedepan dalam pelaksanaan kegiatan PIS-PK perlu sosialisasi, pelatihan petugas, penguatan kelembagaan dan SOTK di Puskesmas, sehingga hambatan seperti yang dikemukakan dalam pertanyaan No. 16 diatas dapat terjawab.

Forum Kabupaten Bungo Sehat (FKBS) segera akan menindaklajuti masukan ini, artinya perlu peningkatan kemampuan kepala desa membangun kerja tim (*tim building*), yang masing-masing melaksanakan tugas sesuai peran masing masing. Kepala desa dan *stake holders* alainnya perlu memusyarakahkan metode apa yang paling cocok untuk perubahan tersebut. Seorang agent yang cerdas akan mampu mencari solusi terhadap ODF. Seperti, mengangkat isu bahwa buang air besar ke sungai adalah perbuatan rendahan atau hina, yang akan merendahkan derajat seseorang.

Kesimpulan

Masyarakat hulu pinggiran sungai berpandangan bahwa sapras jambat sehat merasa belum menjadi kebutuhan mendesak. Faktor dominan penyebab rendahnya cakupan ODF adalah rendahnya pemahaman tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dan apa yang mesti dilakukan membangun komitmen bersama secara berjenjang dari tingkat kabupatenMasih banyak masyarakat yang buang air besar ke sungai yang merupakan kebiasaan turun temurun sehingga sebagai menganggap jamban belum menjadi kebutuhan.

Rekomendasi

1. Pada tingkat Kabupaten

- a. Pengarusutamaan regulasi dan kelembagaan setingkat peraturan daerah
- b. Penguatan anggaran sapras sumber air bersih, sanitasi dan jamban keluarga
- c. Pemeliharaan Dinas PU Dinas Perkim merencakan sarana yang rusak pada proyek terdahulu seperti proyek PANSIMAS, CWSHP,

2. Pada tingkat kecamatan dan desa

- a. Peningkatan *social marketing* pemahaman pentingnya menjaga sungai dari berbagai bentuk pencemaran melalui media kearifan lokal seperti kelompok majelis taklim, Kelompok Yasinan, Remaja Masjid, Posyandu Remaja.
- b. Membuat pesan-pesan yang bersifat edukasi disepanjang sungai
- c. Kegiatan outbound anak sekolah di sungai dengan tema cinta sungai dan berikrar tidak akan membuang sampah ke Sungai

Daftar Pustaka

Andrews, B. R. (1903). Habit. *The American Journal of Psychology*, 14(2), 121–149.

Siagian, R. E. F. (2015). Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), Article 2.

<https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.93>